

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi dalam sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat bertambah (Hasyim, 2017). Menurut Novianingsih (2011) dalam Atmojo (2018) pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menggambarkan suatu perekonomian yang mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi serta dampak suatu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Untuk itu pemerintah suatu negara dengan kerja yang semaksimal mungkin berusaha untuk mengatasi dan mencegah hal-hal negatif dari suatu perekonomian yang tidak diinginkan oleh suatu pemerintahan negara dengan cara mengambil suatu langkah kebijakan yang tepat.

Kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian. Peranan tersebut tercermin pada kemampuannya dalam mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Oleh karena itu, seringkali hal-hal ini menjadi sasaran akhir dari kebijakan moneter (Ascarya, 2017).

Menjaga kestabilan perekonomian melalui kebijakan moneter adalah salah satu tugas utama bank sentral. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.6 Tahun 2009, Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia diberikan mandat untuk menjaga kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah di sini terdiri dari dua aspek, yaitu kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan mata uang terhadap mata uang negara lain (Bank Indonesia, 2020). Salah satu pilar untuk

mencapai tujuan tersebut adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Keberhasilan ekonomi dalam suatu negara sangat ditentukan oleh ketepatan otoritas moneter dalam penentuan kebijakan moneter negaranya. Kebijakan ini tercipta atas adanya respon ekonomi mikro yang kemudian dikelola secara makro oleh para pemangku kebijakan. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia memiliki kewajiban dalam pengendalian moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kebijakan moneter sangatlah penting diterapkan karena berkaitan dengan adanya proposisi yang mengatakan bahwa peredaran uang mempunyai hubungan yang erat dengan sektor barang dan jasa atau sektor riil. Dengan pengendalian jumlah uang beredar di masyarakat akan dapat mempengaruhi variabel-variabel ekonomi di sektor riil seperti tingkat harga dan investasi serta produksi (Sudirman, 2017).

Dalam konteks ekonomi islam, bunga termasuk riba yang mana sesungguhnya merupakan permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian, karena jelas dalam Al-Qur'an bahwa riba itu sangat dilarang atau haram seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah Ayat 275:

.....وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ.....

Artinya:

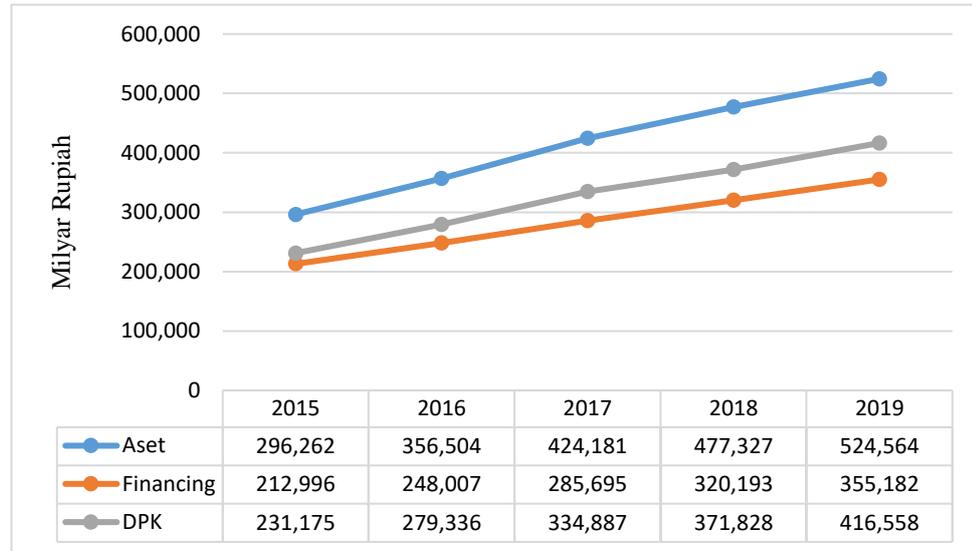
“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. al-Baqarah/2: 275).

Dalam ajaran islam, sektor moneter dan sektor riil haruslah seimbang, karena jika sektor moneter tidak diimbangi oleh sektor riil maka akan tercipta *bubble economy* dimana volume ekonomi lebih bersifat abstrak, dan tidak menggambarkan produktivitas dan kesejahteraan secara riil. Misalkan peningkatan volume transaksi yang tercipta akibat adanya bunga ternyata tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, yang dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan akibat bunga tersebut kemudian direspon oleh peningkatan angka inflasi yang kemudian mengosongkan peningkatan pembangunan ekonomi (Juhro et al., 2018). Jadi sebenarnya secara tegas tidak salah bahwa sistem bunga secara jangka panjang dan kolektif hanyalah akan memiskinkan perekonomian.

Mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan moneter dalam islam pada dasarnya adalah menjaga agar setiap uang yang beredar tidak menumpuk di sektor yang tidak produktif, atau dengan kata lain uang beredar didorong mengalir ke sektor riil. Dengan begitu mekanisme pasar selalu memiliki kekuatan permintaan dan penawaran barang dan jasa yang relatif seimbang. Implikasinya, stabilitas harga akan relatif terpelihara melalui penajagan tingkat permintaan (*demand*) dan penajagan tingkat penawaran (*supply*). Sebagaimana kita ketahui harga akan cenderung naik apabila tingkat permintaan melebihi tingkat penawaran barang dan jasa, atau tingkat penawaran relatif berkurang dari tingkat permintaan (Juhro et al., 2018).

Terbitnya Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menandai berlakunya sistem keuangan syariah di Indonesia yang mengakibatkan berdirinya lembaga keuangan syariah bersama dengan lembaga keuangan konvensional yang beroperasi lebih awal. Hal seperti itu disebut dengan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) yaitu sistem konvensional yang menganut sistem bunga (*interest rate system*) dan sistem syariah yang menganut sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Pasca penerapan kedua sistem tersebut, sistem perbankan syariah dan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat yang lebih luas guna meningkatkan kontribusi pembiayaan pertumbuhan ekonomi nasional (Fikri, 2019).

Sejak saat itu pula perbankan syariah dan keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat melalui total jumlah aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan bank. Hingga akhir tahun 2019 jumlah total aset perbankan syariah (BUS dan UUS) mencapai 524.564 miliar rupiah, pembiayaan yang disalurkan mencapai 355.182 miliar rupiah, dan DPK tumbuh mencapai 416.558 miliar rupiah.



Sumber : www.ojk.go.id (Diolah)

Gambar 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Bank sendiri memiliki peran dalam kebijakan moneter yaitu melalui kredit yang disalurkan. Pentingnya jalur kredit perbankan (*bank lending channel*) dalam transmisi kebijakan moneter diungkapkan oleh Bernanke dan Blinder (1988). Transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan terjadi saat bank sentral melakukan operasi moneter untuk pencapaian sasaran operasionalnya, sementara di sisi lain bank umum melakukan transaksi di pasar uang untuk pengelolaan likuiditasnya. Pada saat terjadi kontraksi moneter maka likuiditas bank akan berkurang sehingga akan berakibat pada menurunnya kredit yang dapat disalurkan oleh bank. Jika kredit bank menurun dan para debitur yang bergantung pada bank jumlahnya dominan dalam perekonomian, maka pengeluaran dan konsumsi swasta akan berkurang (Bank Indonesia, 2020).

Perkembangan industri perbankan syariah yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan adanya perubahan variabel-variabel yang mempengaruhi transmisi kebijakan moneter, yang semula pada sisi konvensional seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), kredit dan suku bunga menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), pembiayaan, dan bagi hasil pada sisi syariah.

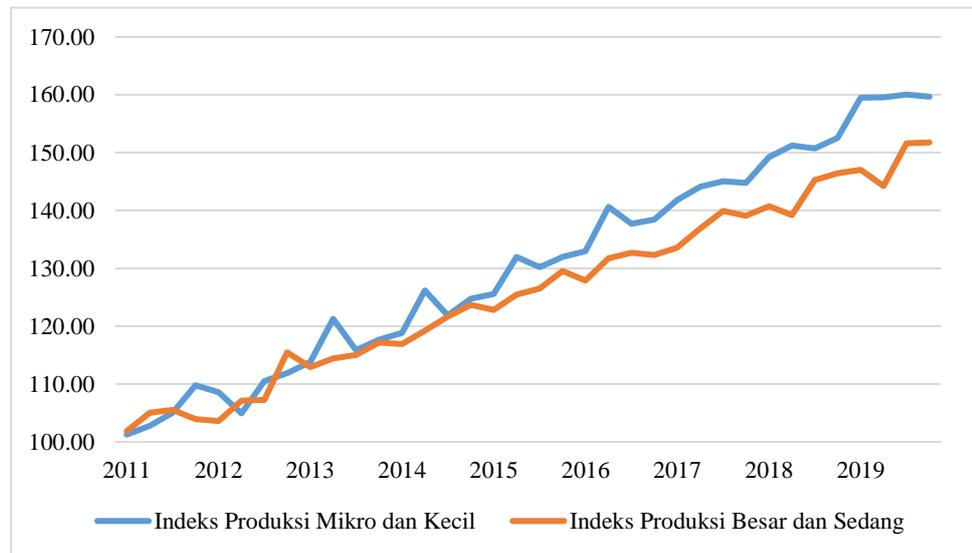
Dalam kebijakan moneter dengan prinsip syariah, instrumen kebijakan moneter yang digunakan diantaranya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Menurut Ascarya (2012) dalam Sofiyullah (2020) tingkat *fee* SBIS berperan sebagai *policy rate*. Perubahan imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS akan ditransmisikan ke imbal hasil Pasar Uang Antarbank Syariah atau PUAS, kemudian PUAS digunakan oleh perbankan syariah dalam mengelola likuiditasnya. Mekanisme ini akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah dimana pembiayaan bank syariah lebih didominasi disalurkan ke sektor riil yang tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan sektor riil di Indonesia.

Keterkaitan sektor keuangan dan sektor riil dapat melemah seiring perkembangan sektor keuangan. Menurut Warjiyo (2004) dalam Karima (2018) sebagian dana yang dimobilisasi oleh lembaga keuangan dapat terus berputar disektor keuangan saja dan tidak berpengaruh terhadap sektor riil. Meningkatnya pembiayaan bank syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, karena tujuan dari aktifitas ekonomi yang islami adalah untuk mendukung kegiatan produktif, membantu masyarakat dalam mengumpulkan modal, dan distribusi kekayaan untuk mencapai kesejahteraan bagi semua.

Salah satu indikator yang dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan sektor riil adalah Indeks Produksi Industri (IPI). Indeks Produksi Industri (IPI) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menghitung output produksi riil dari sektor industri pengolahan. Indeks Produksi Industri ini diklasifikasikan menjadi Indeks Produksi Industri pada Industri Besar dan Sedang (IBS) dan Indeks Produksi Industri pada Industri Mikro dan Kecil (IMK).

Penggolongan industri ini digolongkan didasarkan pada banyaknya tenaga kerja dimana perusahaan industri dengan tenaga kerja lebih dari 20 orang dikategorikan sebagai Industri Besar dan Sedang (IBS) dan perusahaan industri dengan tenaga kerja kurang dari 20 orang dikategorikan sebagai Industri Mikro dan Kecil (IMK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatatkan bahwa pertumbuhan Indeks Produksi Industri di Indonesia

mengalami fluktuasi setiap tahunnya sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut.



Sumber : www.bps.go.id (Data diolah)

Gambar 1.2
Perkembangan Indeks Produksi Industri di Indonesia

Dari gambar diatas terlihat bahwa Indeks Produksi Industri pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) memiliki Indeks yang lebih tinggi daripada Indeks Produksi Industri pada Industri Besar dan Sedang (IBS). Indeks Produksi Industri atau IPI merupakan angka indeks yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan produksi sektor industri pengolahan secara lebih dini serta data *series* yang lebih panjang dan lengkap karena sifatnya yang dirancang secara periodik bulanan dan triwulan.

Peran sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama bagi perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian. Pada tahun 2019 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Indonesia sebesar 19,70 persen. Kontribusi ini lebih tinggi dibandingkan sektor perdagangan dan sektor pertanian yang masing-masing berkontribusi sebesar 13,01 persen dan 12,72 persen. Selain kontribusi melalui nilai tambah produksi, industri pengolahan juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Tahun 2019, industri pengolahan mampu memperkerjakan tenaga kerja 14,96 persen dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia (Diliana et al., 2020).

Pemerintah menggunakan kebijakan moneter dalam mengendalikan dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi) yang mana dapat tercermin melalui data Indeks Produksi Industri. Dalam hal ini, alat yang digunakan oleh pemerintah salah satunya adalah mekanisme transmisi kebijakan moneter beserta instrumen-instrumennya. Warjiyo dan Juhro (2016) mengungkapkan bahwa kebijakan moneter memengaruhi perekonomian melalui dua tahap mekanisme transmisi. Tahap pertama adalah interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas di sektor keuangan. Selanjutnya, dalam tahap kedua mekanisme transmisi terjadi melalui interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi di sektor riil dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Transmisi kebijakan moneter semakin berkembang jalurnya, seperti jalur pembiayaan perbankan syariah yang merupakan komplemen dari jalur kredit perbankan konvensional dan jalur bagi hasil sebagai komplemen dari jalur suku bunga. Hal ini menjadi alasan pentingnya mengkaji transmisi kebijakan moneter berbasis syariah, mengingat pertumbuhan perbankan syariah yang sangat pesat di Indonesia. Selain itu, Heriainingrum dan Syapriatama (2016) dari hasil uji IRF menjelaskan bahwa jalur suku bunga memiliki kesulitan untuk mencapai target makro ekonomi sedangkan instrumen moneter Islam mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan output sektor riil dan menahan laju inflasi.

Pemahaman terhadap mekanisme transmisi kebijakan moneter sangatlah penting agar semakin efektif dampak kebijakan moneter dalam mempengaruhi target akhirnya. Efektivitas kebijakan moneter akan tergantung dari saluran transmisi sebagai tempat berlangsungnya pengaruh kebijakan terhadap sektor riil. Permasalahan mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan topik yang menarik, bukti-bukti empiris masih perlu terus dikaji tidak saja untuk perkembangan teori ekonomi moneter tetapi juga untuk memberikan masukan bagi pemegang otoritas moneter dalam merumuskan kebijakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai kebijakan moneter syariah jalur pembiayaan dan pengaruhnya terhadap sektor riil yang di presentasikan oleh Indeks Produksi

Industri (IPI) pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) terlebih belum banyak peneliti yang menggunakan Industri Mikro dan Kecil (IMK) sebagai indikator sektor riil dalam melihat pertumbuhan ekonomi melalui peranan kebijakan moneter syariah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diterangkan diatas, diperoleh beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah ekonomi moneter dan fisikil islam. Adapun topik bahasan yang dipilih yaitu mengenai kebijakan dan sistem moneter syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu menyangkut pengaruh kebijakan moneter syariah jalur pembiayaan terhadap indeks produksi industri mikro dan kecil di Indonesia tahun 2017-2019

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini mengingat banyaknya perkembangan yang dapat ditemukan dalam permasalahan ini, maka diperlukan adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah penelitian ini membahas kebijakan moneter syariah jalur pembiayaan dengan menggunakan variabel-variabel berupa instrumen pengendalian moneter pada Operasi Moneter Syariah (OMS) yang diberlakukan Bank Indonesia terhadap perbankan syariah berupa posisi moneter Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan tingkat imbal hasil Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Selain berupa variabel pengendali, penelitian ini menggunakan variabel Pembiayaan Bank Syariah sebagai sumber dana perbankan dalam melaksanakan fungsi intermediasi. Variabel yang digunakan sebagai

indikator sektor riil adalah pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan Indeks Produksi Industri (IPI) dengan sampel penelitian yang digunakan yaitu Indeks Produksi Industri pada Industri Mikro dan Kecil (IMK).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah kebijakan moneter syariah SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) berpengaruh terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) pada Industri Mikro dan Kecil di Indonesia?
- b. Apakah kebijakan moneter syariah PUAS (Pasar Uang Antarbank Syariah) berpengaruh terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) pada Industri Mikro dan Kecil di Indonesia?
- c. Apakah Pembiayaan Bank Syariah berpengaruh terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) pada Industri Mikro dan Kecil di Indonesia?
- d. Apakah kebijakan moneter syariah SBIS, PUAS, dan Pembiayaan Bank Syariah berpengaruh terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) pada Industri Mikro dan Kecil di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan moneter syariah SBIS terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) pada Industri Mikro dan Kecil di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan moneter syariah PUAS terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) pada Industri Mikro dan Kecil di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Bank Syariah terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) pada Industri Mikro dan Kecil di Indonesia.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan moneter syariah SBIS, PUAS, dan Pembiayaan Bank Syariah terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) pada Industri Mikro dan Kecil di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan sebagai literatur yang menyajikan informasi umumnya mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah terutama untuk melihat analisis pengaruh transmisi kebijakan moneter syariah jalur pembiayaan terhadap Indeks Produksi Industri Mikro dan Kecil di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai sarana untuk menambah wawasan pemikiran dan pemahaman penelitian mengenai pengaruh kebijakan moneter syariah jalur pembiayaan terhadap indeks produksi industri mikro dan kecil di Indonesia.

2) Bagi Perguruan Tinggi (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan bahan kajian akademik bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya untuk program studi perbankan syariah.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai pengaruh kebijakan moneter syariah jalur pembiayaan syariah terhadap Indeks Produksi Industri.

4) Bagi Bank Indonesia

Disamping itu, penelitian ini bisa dijadikan landasan kebijakan Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan yang terkait mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah khususnya jalur pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis dengan tujuan agar pokok-pokok masalah dapat dibahas secara runtut dan terarah.

BAB I yaitu Pendahuluan, bab ini memuat tentang latar belakang masalah, wilayah kajian, pendekatan penelitian, jenis masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu Landasan Teori, bab ini membahas tentang konsep dan teori yang mendukung variabel penelitian, literature review, dan kerangka pemikiran. Teori-teori dalam landasan teori berasal dari berbagai referensi baik buku, jurnal dan semua yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III yaitu Metodologi Penelitian, bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan operasional variabel, instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV yaitu Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi tentang gambaran data yang bersangkutan, hasil analisis dari pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Bab ini juga memuat hasil penelitian dan penelusuran titik temu antara teori yang sudah dipaparkan kemudian dikaitkan dengan hasil temuan penelitian yang merupakan realitas dilapangan.

BAB V yaitu Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis data dari pembahasan masalah serta saran-saran kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini.